

# HARMONI DAN DISHARMONI SOSIAL ETNIS DI PERKOTAAN

(Studi Hubungan Sosial Etnis  
Makassar dengan Etnis Tionghoa di Kota Makassar)

**M. Darwis**

Univeritas Hasanuddin

## ABSTRAK

Latar hitoris menunjukkan bahwa Sudah tiga kali konflik antaretnik keturunan Tionghoa dengan penduduk setempat (Makassar) terjadi, khususnya di kota Makassar. Konflik itu pecah dengan modus perusakan properti milik para etnik keturunan Tionghoa. Dalam konflik itu, etnik keturunan Tionghoa selalu dirugikan, meskipun mereka tidak tahu menahu sebab musababnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab intensitas interaksi sosial antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di tempat kerja lebih intensif dibanding interaksi di tempat tinggal, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat interaksi sosial antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan permukiman dan di tempat kerja, menganalisa pengaruh nilai budaya dalam interaksi sosial di lingkungan permukiman dan di tempat kerja, menganalisa konflik apa saja yang mempengaruhi atau menghambat interaksi sosial antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan permukiman dan di tempat kerja, sehingga terjadi harmoni dan disharmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data digunakan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi konflikasi hubungan komunal antara etnik Tionghoa dan etnik Makassar, adanya pola relasi di tempat kerja, sementara tokoh-tokoh masyarakat etnik Tionghoa dan Makassar memiliki peran besar dalam mendorong harmonisasi. Selain itu, juga ditemukan adanya faktor pendukung dan penghambat harmonisasi di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Harmoni, disharmoni, etnik Tionghoa, etnik Makassar, interaksi sosial, konflik, kegiatan komunal, integrasi etnik, disintegrasi etnik*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Menilik sejarah, sejak masa kolonial Belanda, tepatnya sejak tahun 1818, sebagaimana Lohanda (1996 : 2) kemukakan bahwa ketika konfigurasi kependudukan masa itu dilegalkan, muncullah istilah *Vreemde Oosterlingen*. Penduduk di berbagai kota dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) bangsa Eropa yang terdiri atas Belanda, Jerman, Swedia, Prancis, Inggris, Denmark, Portugis; (2) Bangsa Timur Asing, yang terdiri atas Cina, Arab, Armenia, India, Persia; dan (3) bangsa

bumiputera, yaitu orang-orang Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Bugis, Batak, Timor, Minangkabau, Dayak. Struktur kependudukan seperti itu pada masa penjajahan Jepang juga cenderung dipertahankan. Menurut Patji (1999 : 50) bahwa setelah Indonesia merdeka, persepsi terhadap kelompok etnik keturunan Tionghoa tidak banyak yang berubah. Pengendalian terhadap kegiatan dan tingkah laku kelompok etnik keturunan Tionghoa bahkan tidak hanya meliputi kehidupan ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan politik, sosial, dan budaya mereka.

Melihat perbedaan tersebut, di kota Makassar pun mengalami hal seperti itu, sehingga jelas bahwa etnik keturunan Tionghoa itu memberikan suatu fenomena tersendiri, khususnya dalam mereka berhubungan dengan penduduk setempat. Fakta menunjukkan bahwa masih ada etnik pribumi (Makassar) di kota Makassar yang “tidak menyukai” etnik keturunan Tionghoa, dan begitu pula sebaliknya, masih ada etnik keturunan Tionghoa yang tidak suka kepada etnik pribumi. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya konflik antaretnik yang telah terjadi pada April 1980. Konflik tersebut pada dasarnya merupakan rasa ketidakpuasan dan keirian orang-orang pribumi terhadap orang keturunan Tionghoa. Kemudian konflik pada 1997 yang dikenal dengan Tragedi Annie Mujahidah. Pada 2006, hampir saja terjadi lagi pengganggangan terhadap orang keturunan Tionghoa, yang dikenal dengan nama Tragedi Latimojong. Tragedi ini terjadi akibat tewasnya seorang pembantu rumah tangga asal Kabupaten Sinjai di rumah seorang warga keturunan Tionghoa. Namun, kerusuhan tidak terjadi akibat sigapnya para petugas keamanan dan peran tokoh masyarakat. Peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa persoalan antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar belum selesai, bagai api dalam sekam, dan sewaktu-waktu bisa muncul bila ada pemicu.

Sudah tiga kali konflik antaretnik keturunan Tionghoa dengan penduduk setempat (Makassar) terjadi, khususnya di kota Makassar. Konflik itu pecah dengan modus

perusakan properti milik para etnik keturunan Tionghoa. Dalam konflik itu, etnik keturunan Tionghoa selalu dirugikan, meskipun mereka tidak tahu menahu sebab musababnya. Itulah realita yang selalu menimpa etnik keturunan Tionghoa lainnya di kota Makassar. Munculnya aksi anti keturunan Tionghoa, tak lain karena orang-orang keturunan Tionghoa, secara sosial ekonomi lebih baik dari orang-orang pribumi (etnik Makassar). Etnik keturunan Tionghoa berhasil dalam mengelola perekonomian, karena mereka tidak mempunyai banyak ruang gerak pada bidang lain, kecuali berusaha dalam bidang ekonomi, di sisi lain etnik Makassar umumnya dibesarkan dalam tradisi *ambtenar* (menjadi pegawai negeri), seiring dengan suasana yang menggandeng sisa-sisa feodalisme, di mana berdagang tidak begitu tinggi statusnya.

Masalah interaksi etnik keturunan Tionghoa dan etnik Makassar yang berlangsung di lingkungan tempat tinggal di kota Makassar, saat ini merupakan salah satu aspek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu diakibatkan tidak adanya kejelasan tujuan dan motif hubungan yang tercipta antarkedua etnik. Motif atau tujuan tersebut tidak perlu dikemukakan secara sadar, juga tidak perlu mereka yang terlibat menyepakati tujuan interaksi sosialnya. Interaksi kedua etnik di lingkungan tempat tinggal mengalami “hambatan”, yang ditunjukkan adanya *eksklusivisme* yang disimbolkan dalam bentuk rumah yang tertutup dengan tembok-tembok

tinggi dan pintu-pintu yang kokoh, seakan-akan etnik keturunan Tionghoa menutup diri dengan tetangga.

Selain hal tersebut di atas menurut Gondogomo (1996 : 91), secara simbolik etnik keturunan Tionghoa memelihara budaya leluhur yang ditandai dengan adanya kecenderungan golongan etnik keturunan Tionghoa untuk menciptakan suatu lingkungan tersendiri, hidup secara eksklusif dan tetap mempertahankan adat kebiasaan kebudayaan dari tradisi leluhur, membanting tulang sambil menyembah arwah.

Karena adanya perbedaan tersebut, maka terciptalah jarak atau pembatas yang menyebabkan tidak terjadinya interaksi sosial yang harmonis, dan menyebabkan putus hubungan komunikasi.

Di sisi lain interaksi antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan tempat kerja menunjukkan intensitas yang lebih tinggi disebabkan karena adanya kepentingan bersama dan saling ketergantungan di antara mereka. Keturunan Tionghoa memerlukan tenaga etnik Makassar untuk menjalankan usaha dagangnya, sementara etnik Makassar membutuhkan lapangan kerja untuk kelanjutan hidupnya.

Salah satu tujuan utama interaksi sosial adalah menyangkut penemuan diri, yang berperan dalam terciptanya hubungan yang harmonis, yang dimulai dengan terciptanya komunikasi budaya antarkeduanya. Namun hal itu tidaklah terjadi, di mana dalam aktivitas

sehari-hari, di permukiman misalnya, komunikasi antarbudaya yang diharapkan dari kedua etnik tidaklah tercipta. Hal ini akibat adanya kendala yang menghambat, seperti tidak terciptanya penerimaan, baik secara fisik maupun nonfisik, akan kehadiran etnik keturunan Tionghoa dalam aktivitas komunal di lingkungan permukiman.

Etnik keturunan Tionghoa, biasanya mengekspresikan keterlibatannya di kegiatan-kegiatan komunal, khususnya di tempat tinggal, berupa partisipasi materi (sumbangan uang), bukan kehadiran fisik dalam bentuk membaaur dalam kegiatan-kegiatan di permukiman. Meskipun partisipasi material sudah diberikan oleh etnik keturunan Tionghoa, akan tetapi di pihak lain, wujud partisipasi itu tidaklah dapat mengikat secara psikologis, sehingga tidak memunculkan ikatan-ikatan emosional di antara keduanya. Apabila terjadi konflik, meskipun pemicunya adalah sesuatu yang sangat sepele, akan menghasilkan efek yang besar, bukan saja kerugian material, juga trauma psikologis yang sangat sulit disembuhkan dalam waktu singkat.

## 1.2. Bahan dan Metode

Populasi penelitian adalah etnik Tionghoa dan Makassar yang telah berdomisili minimal 5 tahun di Kota Makassar. Informan penelitian terdiri atas 37 orang yang terdiri atas 30 orang informan kunci; 30 informan etnik Tionghoa dan 30 orang informan etnik Makassar. Ada 7 orang informan pelengkap.

Metode penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini berbentuk **deskriptif analitik** dengan menerapkan prinsip-prinsip *grounded research* yang dititik beratkan pada pengamatan dan wawancara.

## II. Kajian Pustaka

### 2.1. Harmoni Dan Disharmoni Etnik Dalam Perspektif Hubungan Antarkelompok

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Sosiologi dikemukakan berbagai kerangka teori yang menganalisis tentang hubungan antaretnik, dan masing-masing teori yang ada mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun saling melengkapi. Pada mulanya para ahli sosiologi kurang mempunyai perhatian terhadap permasalahan hubungan antaretnik. Simson dan Yinger (1965 : 376-399) menyebutkan bahwa tumbuhnya perhatian para ahli sosiologi terjadi secara bertahap. Pada tahap *pertama*, ulasan para ilmuwan sosial mengenai hal ini masih diwarnai pernyataan yang mengandung nada rasisme. Tahap *kedua* ditandai oleh deskripsi dan pengamatan lebih objektif, dan penggunaan konsep-konsep yang belum terkait dengan teori sosiologi yang ada. Pada tahap *ketiga* telah timbul usaha untuk mengaitkan analisis hubungan itu dengan teori sosiologi serta penelitian, termasuk eksperimen terhadap masalah ini. Baru pada tahap *keempat* mulai terjadi integrasi antara kajian hubungan antaretnik (kelompok etnik) tersebut dengan teori sosiologi.

Van Den Berghe (1967: 34-37)

beranggapan bahwa konsep konflik sangat penting bagi analisis terhadap masyarakat multiras. Para penganut fungsionalisme telah menekankan kajian mereka pada Konsensus, Kekeragaman, dan Keseimbangan; namun Van Den Berghe melihat konflik antarkelompok dapat menjadi sumber penting bagi perubahan sosial, sehingga penggunaan teori konflik dapat memberi manfaat bila diterapkan untuk menjelaskan hubungan antar-ras.

Alternatif lain yang dikemukakan Banton sebagai penjelasan terhadap konformitas ialah teori pertukaran dari George C. Homans (lihat Banton, 1967 : 67-68 ). Banton berpendapat bahwa model transaksi yang melihat interaksi sebagai pertukaran bahwa wujud untuk memperoleh keuntungan maksimal mampu menjelaskan variasi perilaku yang tidak dapat dijelaskan oleh kerangka teori lain.

Selanjutnya teori lain yang membahas masalah hubungan antar-ras ataupun kelompok etnik, dikemukakan oleh Barth dan Noel (1980 : 416-437) yang mengidentifikasi empat permasalahan sosiologis dalam hubungan antar-ras atau kelompok di dalam masyarakat: masalah kemunculan (**emergence**), kemantapan (**persistence**), adaptasi, dan perubahan bagaimana pola diferensiasi kelompok sosial muncul, menjadi stabil dan mantap, dan kemudian hilang atau berubah. Menurut mereka masing-masing di antara keempat permasalahan ini, dapat dijelaskan secara lebih baik oleh salah satu di antara empat kerangka teori sosiologi: Teori Siklus (**Race**

*Cycle Theory*), Teori Konsensus (*Consensus Theory*), Teori Kesalingtergantungan (*Interdependence Theory*), dan Teori Konflik (*Conflict Theory*).

Robert Park pengembang teori siklus, mengemukakan bahwa hubungan antar-ras, merupakan suatu siklus yang melibatkan kontak, persaingan, akomodasi, dan pada akhirnya asimilasi. Menurut Barth dan Noel (1980: 422-426) kekuatan utama kerangka teori ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan suatu hubungan antarkelompok yang telah mapan. Menurut penjelasan para penganut strukturalisme fungsional, suatu sistem sosial dapat bertahan karena adanya kesalingtergantungan antarbagian-bagian sistem yang didasarkan pada konsensus mengenai sistem nilai bersama. Di lain pihak, para penganut interaksionisme simbolis, mengemukakan bahwa perilaku sosial yang terorganisasi dan berorientasi pada tujuan, memerlukan adanya simbol yang dianut bersama (*shared symbol*), kesepakatan mengenai makna nilai berbagai objek.

Apabila dibandingkan dengan kerangka-kerangka teori yang telah disebutkan sebelumnya, maka kerangka teori konflik menurut Barth dan Noel lebih mampu menjelaskan permasalahan perubahan pada hubungan antaretnik. Kerangka teori konflik berorientasi pada perubahan, karena beranggapan bahwa perubahan melekat pada sistem sosial. Dalam tiap masyarakat dijumpai ketidaksepadanan struktural, perbedaan

kekuasaan dan masalah struktural lainnya, yang akan menghasilkan konflik antarpihak-pihak yang menginginkan perbaikan kedudukan mereka, dan benturan antara kepentingan yang bertentangan ini akan menghasilkan perubahan.

Selanjutnya Teori Lieberman berpangkal pada tahap awal terjadinya antarkelompok ras dan etnik (Lihat Stanley, 1961 : 887-898 ). Tesis Lieberman tersebut adalah untuk memahami tahap akhir dan tahap antara dari hubungan antarkelompok etnik dan ras. Maka pemahaman mengenai dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial belumlah memadai dan perlu dilengkapi situasi kontak pada awal hubungan, apakah kontak yang terjadi menghasilkan ditundukkannya penduduk pribumi oleh kelompok pendatang (*migrant superordination*) ataukah berbentuk ditundukkannya kaum pendatang oleh suatu kelompok ras atau etnik setempat (*indigenous superordination*).

Pembahasan Lieberman mengenai pengendalian politik dan ekonomi, berpandangan bahwa dalam kasus superordinasi kaum migran terhadap penduduk setempat maka penduduk setempat diharuskan menerima pranata-pranata ekonomi dan politik kaum pendatang. Tatanan penduduk mulai dicampuri. Kontak yang semula bersifat bersahabat kemudian sering beralih menjadi konflik. Dalam banyak kasus, penduduk setempat menjadi korban penyakit yang dibawa pendatang, korban pembunuhan dan

perampasan harta benda, dan diadu domba dengan kelompok setempat lainnya. Proses-proses demikian mengakibatkan gejolak di bidang demografi maupun ekonomi. Dalam sistem demikian, masyarakat setempat tidak dapat membatasi jumlah migran yang datang.

Apabila kekuasaan politik dan ekonomi dipegang oleh masyarakat setempat, keadaannya cenderung berbeda. Dalam superordinasi masyarakat setempat ancaman terhadap stabilitas demografi dan pranata masyarakatpun lebih kecil karena masyarakat setempat dapat membatasi jumlah pendatang.

Pada tahap awal, menurut Lieberson, kemungkinan terjadinya konflik relatif lebih terbatas. Seandainya pun terjadi konflik, konflik yang terwujud tidak berbentuk revolusi atau usaha mengusir kelompok lain. Kenyataan bahwa para migran sering mengalami perbaikan taraf hidup membatasi kemungkinan terjadinya konflik.

Perbedaan lain antara superordinasi migran dan superordinasi masyarakat setempat, menurut Lieberson, terletak pada bidang kontak etnik majemuk. Dalam kasus superordinasi kaum migran mereka dapat di bidang kontak etnik majemuk. Dalam kasus superordinasi kaum migran mereka dapat memasukkan kelompok migrant baru untuk berperan dalam sistem ekonomi dan politik baru yang diciptakan kaum migran baru untuk berperan dalam sistem ekonomi dan politik baru yang diciptakan kaum migran karena masyarakat setempat dianggap dianggap tidak

mampu berperan. Namun apabila yang berkuasa adalah masyarakat setempat mereka dapat membatasi jumlah dan latar belakang migran yang masuk dari luar agar tidak ada kelompok migran yang menjadi dominan.

*Pierre Van Den Berghe* mengembangkan suatu tipologi mengenai hubungan-hubungan antar-ras. Menurutnya hubungan antar-ras dapat dibagi dalam dua tipe ideal yaitu: **Tipe paternalistis** dan **Tipe kompetitif**. Kedua tipe hubungan antar-ras tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor perekonomian, pembagian kerja, mobilitas sosial, stratifikasi sosial, jumlah anggota masing-masing kelompok, dan sistem nilai. Faktor-faktor ini oleh Van Den Berghe diajukan sebagai variabel bebas, yang membawa dampak pada sejumlah aspek dari hubungan antar-ras, yaitu aspek hubungan antar-ras, peranan dan status, etiket, bentuk agresi, pencampuran fisik, segregasi, sindrom psikologis, stereotipe, dan prasangka (lihat Van Den Berghe, 1967:31-32).

Dalam suatu sistem hubungan antar-ras yang bersifat paternalistis, hubungan antar-ras mengikuti model majikan-pelayan. Tipe ini dijumpai pada masyarakat kompleks praindustri yang didasarkan pada perekonomian pertanian dan produksi kerajinan tangan seperti produksi hasil pertanian dan perkebunan disertai perbudakan. Dalam tipe hubungan antar-ras ini kelompok yang didominasi menyesuaikan diri dengan kedudukan lebih rendah serta dihindangi rasa rendah diri karena dianggap dan diperlakukan

sebagai kelompok yang belum dewasa, tidak punya tanggung jawab, kekanak-kanakan dan harus “tetap berada di tempatnya”. Ras menjadi ukuran untuk menentukan peranan.

Tipe hubungan antar-ras yang bersifat kompetitif, menurut Van Den Berghe merupakan kebalikan dari tipe hubungan paternalistik dan dijumpai dalam masyarakat perkotaan dan industri dengan pembagian kerja yang kompleks dan produksi tipe manufaktur. Di sini keanggotaan dalam suatu ras masih penting namun perbedaan kelas menjadi lebih menonjol daripada perbedaan kasta. Peralihan status melalui usaha menggeser perolehan status melalui kelahiran sehingga kelompok yang didominasi dapat melakukan mobilitas sosial, horizontal maupun vertikal. Pola majikan-pelayan berubah menjadi persaingan ketat antara kelompok dominan dan kelompok yang didominasi.

## 2.2. Harmoni Dan Disharmoni Etnik Dalam Perspektif Konflik

Dalam melihat konflik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu beberapa pengertian yang sering sulit dibedakan antara Pengertian Konflik dan Pengertian Kekerasan. Konflik tidak selamanya berwujud kekerasan, sedangkan kekerasan kadang dimulai dengan adanya konflik yang mendahului yang biasanya bersifat laten. Konflik biasanya melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai, atau anggapan yang dianggap tinggi. Konflik dapat melibatkan tiga hal (Nur Zain Hae, dkk, 2000 : 18-20 ) yaitu: **Status,**

**Kekuasaan,** dan **Sumber daya yang langka.** Konflik itu memang selalu ada, Manusia hidup selalu berkonflik. Konflik ada di alam dan hadir dalam kehidupan manusia. Konflik menciptakan perubahan.

Dalam masyarakat homogen, majemuk/plural, masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalahnya, sehingga masyarakat tersebut memandang pula konflik dan pengertiannya berbeda. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Masing-masing masyarakat memiliki sejarah dan karakteristik yang unik.
- b. Masing-masing individu/kelompok dilahirkan atas perbedaan jenis kelamin.
- c. Masing-masing individu/kelompok dilahirkan dalam suatu tata cara hidup tertentu. Seorang pengembara dusun di Timur Tengah dan seorang yang tinggal di kota di New York memiliki perbedaan pengalaman dan pandangan tentang dunia dan tempat mereka.
- d. Masing-masing masyarakat memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku kita serta memotivasi kita dalam mengambil tindakan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas kiranya, pandangan masyarakat tentang konflik dan penyebabnya sangat berbeda.

## 2.3 Pandangan ahli tentang konflik

Beberapa ilmuwan sosial mendefinisikan konflik dari berbagai aspek, sebagaimana Talcott Parson (1995: 209) menganggap konflik itu perlu dalam rangka menjaga integrasi, yang



sangat berbeda dengan pandangan Marx di mana Marx menunjukkan sebaliknya bahwa setiap perubahan yang dicanangkan/diinginkan haruslah melalui konflik. Karena sesungguhnya konflik yang membuat masyarakat menjadi dinamis.

Lebih jauh analisa teoretis Parsons tentang terpeliharanya konflik atau konflik masih dalam kendali yang sangat berbeda dengan Marx, Parsons mengemukakan bahwa bila ingin menunjukkan beberapa bentuk tentang hubungan yang logis atau kuat di antara suatu nilai spesifik, norma atau pola-pola perilaku dan sejumlah nilai-nilai umum, yang melembaga sehingga dapat dijelaskan sebagai suatu kekuatan perubahan dalam suatu masyarakat, konflik, baik yang *manifest* maupun yang *latent*, haruslah benar-benar dapat menciptakan dan membawa perubahan bagi masyarakat dengan pola terstruktur dan tidak mengorbankan elemen lain yang menjadi bagian dari suatu struktur sosial masyarakat. Sedangkan Lewis Coser (1967: 19) lebih melihat konflik pada integrasi suatu kelompok. Lebih lanjut Coser menyatakan bahwa untuk menjadikan kelompok itu solid maka ciptakan konflik dengan *out group*-nya, namun konflik dapat juga menyebabkan lemahnya solidaritas suatu kelompok.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Harmoni dan Disharmoni Sosial Etnik

Menurut Lewis A. Coser (1991: 259), interaksi sosial merupakan hubungan-

hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia. Interaksi sosial itu menunjuk pada suatu kegiatan yang melibatkan sikap, nilai maupun harapan masing-masing individu. Dengan demikian mengamati interaksi sosial berarti mempelajari suatu sistem sosial, karena mempelajari aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dengan suatu pola tertentu yang berdasarkan sikap, nilai, maupun harapannya.

Dalam konteks interaksi sosial antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di Kota Makassar, yang terlihat dalam interaksi tersebut adalah interaksi yang terjadi dan berlangsung di lingkungan permukiman dan di lingkungan tempat kerja. Dari interaksi itu kemudian tercipta suatu interaksi yang mengandung relasi, namun dari interaksi itu pula terjadi pertentangan-pertentangan, yang memberi warna kedinamisan interaksi kedua etnik, sehingga terjadi harmoni dan disharmoni sosial. Harmoni dan disharmoni dibatasi sebagai suatu corak interaksi sosial di antara kedua pihak yang berbeda, ditandai dengan pengendalian diri dan kesadaran akan keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta kerja sama dengan mementingkan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Interaksi sosial antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan permukiman, maupun di lingkungan tempat kerja dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang



bersifat sukarela dan sebagai suatu keharusan. Maksud sukarela di sini ialah bahwa secara otomatis etnik keturunan Tionghoa dan etnik Makassar melakukan interaksi, seperti mengobrol, tolong-menolong pada saat suka dan duka, hajatan, olahraga, kesenian. Interaksi yang bersifat keharusan adalah interaksi yang dikoordinasi oleh pemerintah setempat, pemuka masyarakat/organisasi, seperti siskamling bersama, kebersihan lingkungan (kerja bakti), sumbangan sosial. Sehingga interaksi kedua pihak berlangsung secara formal dan informal, atau berlangsung secara fleksibel sesuai tujuan kegiatan yang terjadi.

Interaksi yang terjadi di lingkungan tempat kerja sifatnya tidak lebih dari interaksi antara majikan dengan pekerja, atau sebaliknya. Sungguhpun demikian, interaksi yang terjalin itu dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik berupa materi maupun nonmateri. Keuntungan materi yaitu etnik Makassar yang bekerja pada etnik keturunan Tionghoa terbantu dalam memperoleh pekerjaan. Sedangkan keuntungan nonmateri yaitu semakin meningkatnya pembauran antara kedua pihak yang memiliki latar belakang sosial budaya sangat berbeda.

Selain itu interaksi yang tercipta di lingkungan tempat kerja, dapat pula berupa pertukaran jasa, yaitu bentuk jasa pembantu rumah tangga atau buruh lepas. Jalinan interaksi yang demikian itu, membuat kedua pihak merasa diuntungkan. Orang keturunan Tionghoa sudah dapat menerima dan bahkan

memercayai orang Makassar menjadi pembantu (dalam rumah tangga atau dalam menjalankan usaha bisnis) dan menerima masuk ke dalam aktivitas sosial orang keturunan Tionghoa. Begitu pula orang Makassar dapat bekerja dengan orang keturunan Tionghoa, sehingga prasangka etnik akan semakin melebur, yang kemudian tergantikan oleh interaksi yang saling menguntungkan.

Selanjutnya apabila terdapat perbedaan, akan mengembangkan atau memupuk berbagai tingkat gaya hidup yang berbeda untuk bisa hidup berdampingan dan berdekatan. Salah satu cara untuk mencapai keseimbangan hidup berdampingan dan berdekatan adalah melalui integrasi. Integrasi sebagai salah satu proses dan hasil dari kehidupan sosial merupakan alat yang bertujuan untuk mengadakan suatu keadaan kebudayaan yang homogen. Oleh karena itu, integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma yaitu karena norma kelompoklah merupakan unsur yang mengatur tingkah laku. Dengan demikian, harus tercapai dulu konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial.

Situasi kehidupan masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat Makassar, menggambarkan suatu keadaan yang berbeda dalam gaya hidup antara satu dengan yang lain. Kedua belah pihak diwarnai oleh latar belakang budaya masing-masing. Walau kedua belah pihak memiliki perbedaan dalam norma tentang nilai kemasyarakatan dan dalam gaya

hidup, mereka tetap melakukan interaksi. Interaksi itulah yang menentukan integrasi dalam kehidupan sosial kedua pihak, yang pada akhirnya terjadi harmoni dan disharmoni sosial.

Faktor lain yang memengaruhi interaksi sosial yang ditemukan adalah adanya jarak sosial di antara keduanya. Jarak sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu jarak sosial yang subjektif dan jarak sosial yang objektif. Jarak sosial yang subjektif adalah persepsi kedua belah pihak dalam memandang suatu hal, sedangkan jarak sosial objektif adalah perbedaan status sosial, ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan.

### 3.1.1. Corak Kompleksitas Hubungan Komunal

Interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal berupa interaksi antartetangga ditelusuri melalui keakraban antartetangga dalam bentuk kegiatan saling berkunjung, saling bantu-membantu. Selain itu, juga dapat ditelusuri lewat masalah dan sumber masalah yang sering muncul dalam suatu interaksi antartetangga, cara dan pihak yang berperan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang timbul, dampak masalah yang terjadi terhadap sistem sosial setempat, aspirasi sosial yang muncul dalam interaksi antartetangga.

#### a. Kompleksitas Interaksi Antartetangga

Untuk mengetahui terjadi atau berlangsung suatu interaksi antaretnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan tempat tinggal, perlu diperhatikan sejauh mana aktivitas di lingkungan tempat

tinggal menciptakan keakraban. Menurut Murray S. Davis (1973: 290), keakraban adalah hasil dari interaksi. Tidak ada keakraban tanpa adanya interaksi. Interaksi itu sendiri merujuk kepada keadaan dan proses saling menanggapi, saling bertukar pesan, baik melalui lisan maupun lewat aksi tindakan di antara dua individu atau lebih.

Kehidupan ketetanggaaan yang saling kenal di antara mereka itu, tidak selamanya berarti bahwa mereka akrab. Hal itu disebabkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi dan pendidikan. Interaksi tidak terjadi, karena etnik keturunan Tionghoa yang tingkat ekonominya berhasil, telanjur dianggap “sombong” dan tidak mau bergaul. Sebaliknya, etnik Makassar, khususnya yang berpendidikan rendah, tidak merasa percaya diri untuk bergaul. Akibat jarak sosial, interaksi sosial kurang lancar dan terjadi *prejudice* (sangkaan etnik) yang terpendam pada kesadaran masing-masing.

Selain perbedaan status ekonomi dan pendidikan, interaksi terhambat karena adanya beberapa perbedaan pelaksanaan ritual budaya. Etnik keturunan Tionghoa yang melaksanakan ritual budayanya dianggap oleh warga etnik Makassar sebagai penonjolan “ketionghoan” yang masih sulit diterima oleh warga etnik Makassar. Padahal, bagi warga etnik keturunan Tionghoa, merayakan ritual budaya Tionghoa merupakan tradisi nenek moyang dan nilai luhur yang perlu dilestarikan.

Bila ingin menciptakan keakraban melalui aktivitas ketetanggaaan antara etnik

keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar, kedua pihak hendaklah menciptakan rasa toleransi karena tanpa toleransi, interaksi tak dapat berlangsung. Potensi untuk bersatu atau paling sedikit untuk bekerja sama tentu ada dalam tiap-tiap interaksi yang berlangsung di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan tempat kerja antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar.

Potensi tersebut ada dua. *Pertama*, warga kedua etnik dapat saling bekerja sama secara sosial ekonomis, dalam lapangan pekerjaan yang berbeda mereka dapat saling melengkapi. Keadaan butuh-membutuhkan itu akan berkembang menjadi suatu hubungan simbiotik. Dalam hal itu, sikap para warga dari kedua etnik terhadap yang lain dijiwai oleh suasana toleransi. *Kedua*, warga dari kedua etnik dapat juga hidup berdampingan tanpa konflik jika ada orientasi ke arah suatu golongan ketiga yang dapat menetralisasi hubungan antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar.

Untuk menciptakan harmoni sosial dan menghambat disharmoni sosial antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di Kota Makassar, konflik antaretnik bukanlah sesuatu yang menghambat. Namun, yang perlu diwaspadai adalah keadaman hubungan keduanya jangan dijadikan patokan bahwa hubungan keduanya sudah dianggap harmonis. Jangan sampai di bawah permukaan, kedua etnik memendam perasaan sentimen ras yang mendalam.

#### b. Partisipasi dalam Kegiatan Komunal

Beberapa kegiatan yang kerap diselenggarakan, baik oleh penduduk setempat maupun oleh pemerintah atau organisasi yang ada, di antaranya perayaan hari besar nasional, kerja bakti gotong royong dalam kegiatan pembangunan fisik. Sedangkan yang diselenggarakan oleh individu adalah pesta perkawinan, khitanan, ulang tahun, kematian. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan oleh etnik keturunan Tionghoa maupun oleh etnik Makassar, kedua pihak cenderung melibatkan diri, meskipun kadang tidak melibatkan diri secara fisik, akan tetapi sumbangan materi, sehingga dalam kondisi demikian itu, kedua etnik saling berhubungan dan berkomunikasi.

Dalam peringatan hari-hari besar nasional sering dilakukan kegiatan, seperti olahraga dan kesenian, terutama di kalangan para pemuda. Dalam kegiatan tersebut kedua etnik bergabung merayakan bersama, sehingga terlihat dalam suatu tim olahraga misalnya, terdapat etnik keturunan Tionghoa dan etnik Makassar. Pada saat seperti itu, perbedaan ras kelihatan tipis sekali, karena rasa kebersamaan membela tim yang menonjol.

Warga keturunan Tionghoa juga turut serta dalam kegiatan kerja bakti gotong royong yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat guna kepentingan sekitar lingkungan permukiman mereka. Partisipasi etnik keturunan Tionghoa kerap kali berupa materi, karena kesibukan mengurus ekonomi. Dari segi interaksi yang mementingkan keterlibatan individu secara fisik, hal itu sangat kurang

memadai untuk mencapai sasaran untuk membaurkan mereka. Sumbangan berupa materi, yang meskipun dianggap sudah melibatkan diri serta berpartisipasi, dapat menghasilkan hubungan "semu" karena secara psikologis mereka tidak menumbuhkan relasi sosial, di mana keterlibatan individu secara fisik, sangat diperlukan dalam behubungan.

### 3.1.2. Corak Hubungan di Lingkungan Tempat Kerja

Pola hubungan antarindividu dalam kelompok dapat diamati sebagai suatu pola hubungan tingkah laku timbal balik antarperanan yang masing-masing diikat pada status tertentu. Karena itu, interaksi antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar yang berlangsung di tempat kerja menampakkan suatu pola, yang melibatkan individu-individu atau tingkah laku yang masing-masing dilakokan dengan suatu peran yang diikat oleh status masing-masing.

Menurut Vander Zanden (1970 : 116), manusia dalam kehidupannya terikat dalam suatu arena sosial melalui jaringan kerja dari peranan yang beralasan. Manusia yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan dan melalui peranan. Hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lain. Selanjutnya Goffman (1961 : 92) berpendapat bahwa peranan seseorang dalam berinteraksi merupakan seperangkat norma-norma yang membatasi hak-hak, yaitu tindakan-tindakan yang dapat secara sah kita tuntutan agar orang lain

melakukanya. Sedangkan kewajiban adalah tindakan yang orang lain dapat menuntut secara sah untuk kita lakukan. Begitu pula Ralph Linton (1984:261) menganggap bahwa peranan adalah aspek dinamis dari satu status dan dapat dilihat sebagai suatu pola tingkah laku yang merupakan konsekuensi dari adanya hak dan kewajiban. Secara samar tiap status menunjuk pada suatu posisi tertentu dalam suatu pola—terlepas dari individu yang menempatinnya. Karena itu, setiap status masing-masing merupakan kumpulan dan kewajiban.

Berdasarkan pendapat ahli yang dikemukakan di atas, terlihat pula pada interaksi etnik keturunan Tionghoa sebagai majikan dari etnik Makassar yang bekerja padanya. Dalam interaksi tersebut terbentuk suatu pola hubungan kerja, seperti hubungan antara majikan dengan pekerjaanya, yang diwarnai dengan sejumlah peranan (hak-hak dan kewajiban) yang ditandai oleh tuntutan pertukaran pelayanan dan imbalan tertentu. Di satu sisi, etnik Makassar sebagai pekerja menawarkan tenaganya, di pihak lain orang keturunan Tionghoa memberikan imbalan berupa upah atau keterampilan yang secara tidak langsung. Menurut Blau (dalamTurner, 1989: 252-253), pelayanan atau pemberian yang ditawarkan memiliki nilai yang cukup berharga untuk diberi imbalan-imbalan tertentu. Hubungan-hubungan yang terjadi di mana imbalan-imbalan diharapkan dan diberikan di antara pelaku terjadi pertukaran. Blau mengonseptualisasikan empat kelas umum dari

imbalan, yakni uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan, dan kepatuhan, serta alasan utama yang membuat individu melakukan pertukaran ialah karena pertukaran mempunyai sifat intrinsik dan ekstrinsik. Adapun pertukaran yang terjadi antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar—yang diartikan sebagai hubungan yang bermotif ekonomi, berdasarkan pelayanan jasa oleh etnik Makassar, yang bagi etnik keturunan Tionghoa merupakan keuntungan tersendiri (dapat memberi upah murah)—sering bersifat asimetris dan bersifat unilateral. Sebagaimana dijelaskan oleh Blau, ada kemungkinan terjadi ketergantungan sepihak karena tidak adanya alternatif yang mungkin dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan pelayanan tertentu. Tak ada pilihan lain baginya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pihak penyedia pelayanan.

Berdasarkan pemikiran Blau di atas, terdapat empat alternatif yang menunjukkan kondisi ketergantungan sosial dari individu yang membutuhkan pelayanan (majikan). Apabila majikan tak dapat memenuhi keempat alternatif itu, maka mau tak mau, ia harus mematuhi tuntutan-tuntutan penyedia pelayanan (pekerja). Dalam konteks ini etnik Makassar yang bekerja pada orang-orang keturunan Tionghoa memperlihatkan bahwa mereka bukan sebagai penyedia jasa semata, melainkan mereka memainkan peranan penting dalam kelangsungan usaha ekonomi orang-orang

keturunan Tionghoa. Interaksi yang terjadi adalah: etnik Makassar yang bekerja itu menggantungkan harapan untuk memperoleh upah (gaji) dari majikan yang berketurunan Tionghoa. Begitu pula sebaliknya, orang keturunan Tionghoa yang mempekerjakan orang Makassar sangat tergantung kepada orang-orang Makassar.

### 3.1.3. Peranan Pemuka Masyarakat

Keterlibatan di dalam kegiatan yang terselenggara di lingkungan permukiman etnik keturunan Tionghoa maupun etnik Makassar, tidak terlepas dari peranan para pemuka masyarakat (pimpinan formal dan informal) yang senantiasa mengupayakan agar kedua etnik terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, para pemuka juga merupakan orang pertama yang akan dimintai bantuan oleh etnik keturunan Tionghoa. Peranan pemuka masyarakat sebagai mediator-penghubung sangat besar dalam mendorong terjadinya interaksi di antara kedua etnik.

Seorang pemuka masyarakat bukan saja menjalankan peran sebagai penganjur melainkan merangkap pula sebagai juru damai apabila terjadi konflik. Dengan kedudukan itu, di satu pihak ia harus bertindak adil berdasarkan urgensi masalah, namun di sisi lain ia sering terdesak manakala penyelesaian konflik itu dianggap merugikan etnik Makassar.

### 3.2. Harmoni dan Disharmoni Sosial di Tempat

### Tinggal dan Tempat Kerja

Interaksi yang berlangsung secara intensif antara etnik keturunan Tionghoa dan etnik Makassar menghasilkan cara pandang (pola pikir), sikap, perilaku dan dorongan untuk saling:

- a. Mengenal (*acquainted*)
- b. Menghargai (*respect*)
- c. Memahami (*understand*)
- d. Membuka diri (*sincere*)
- e. Berdialog (*dialogue*)
- f. Menerima (*welcome*)
- g. Memercayai (*trust*)
- h. Berpikir kasuistik
- i. Menyatu (*inclusive*).

Unsur-unsur tersebut sangat penting peranannya untuk menciptakan interaksi antaretnik secara harmonis.

Sebaliknya, interaksi yang hanya

berlangsung secara insidental (intensitas rendah atau kurang intensif) berkemungkinan menciptakan pola pikir, sikap, dan perilaku yang cenderung:

- a. Mengabaikan (*indifference*)
- b. Merendahkan (*misjudge*)
- c. Salah paham (*misunderstand*)
- d. Menutup diri (*insincere*)
- e. Stigmatisasi (*discredit*)
- f. Menolak (*unwelcoming*)
- g. Curiga (*prejudice*)
- h. Menggeneralisasi
- i. Memisahkan diri (*exclusive*)

Hubungan antara variabel-variabel interaksi sosial yang intensif dan yang insidental dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Hubungan Indikator Interaksi Intensif dan Insidental terhadap Harmoni/Disharmoni Sosial

Intensitas interaksi	Indikator	Harmoni	Disharmoni
Intensif	saling mengenal	+	-
	saling menghargai	+	-
	saling memahami	+	-
	saling terbuka	+	-
	Dialogis	+	-
	saling menerima	+	-
	saling percaya	+	-
	berpikir kasuistik	+	-
	Inklusif	+	-
Insidental	Mengabaikan	-	+
	Merendahkan	-	+
	salah paham	-	+
	menutup diri	-	+
	stigmatisasi ( <i>discredit</i> )	-	+
	menolak ( <i>unwelcoming</i> )	-	+
	curiga ( <i>prejudice</i> )	-	+
	Menggeneralisasi	-	+
	Ekklusif	-	+

Sumber :Olahan data primer tahun 2007

Interaksi yang dilandasi hal-hal insidental di atas, berpeluang menciptakan interaksi sosial yang tidak harmonis. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas (semakin intensif) interaksi yang berlangsung antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar, semakin besar pula peluang bagi

terciptanya interaksi sosial yang harmonis di antara mereka. Di sisi lain, semakin rendah intensitas interaksi (insidental) yang terjadi di antara kedua etnik tersebut, semakin tinggi pula peluang terciptanya disharmoni sosial di antara mereka. Perhatikan pula tabel berikut ini:

Tabel 2  
Hubungan Intensitas Interaksi dengan Harmoni/Disharmoni Sosial

<b>Intensitas Interaksi</b>	<b>Harmoni Sosial</b>	<b>Disharmoni Sosial</b>
Interaksi intensif	+	-
Interaksi insidental	-	+

Sumber : Olahan data primer tahun 2007

Data yang ada juga mengindikasikan bahwa interaksi sosial antara warga Kota Makassar keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan tempat tinggal memiliki intensitas yang berbeda dengan interaksi yang terjadi di lingkungan kerja. Interaksi antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan tempat tinggal cenderung lebih rendah intensitasnya dibanding interaksi yang berlangsung di lingkungan tempat kerja. Ada sejumlah faktor yang membuat interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal antara kedua etnik tersebut cenderung bersifat insidental dan intensitasnya rendah. Faktor-faktor tersebut adalah:

- (1) Kecenderungan untuk membentuk permukiman secara berkelompok berdasarkan identitas etnik.

- (2) Tempat tinggal atau rumah yang difungsikan hanya sebagai tempat beristirahat dan melepas lelah

Kecenderungan untuk membentuk permukiman atau memilih lokasi tempat tinggal secara berkelompok berdasarkan etnik masing-masing bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan terjadi dengan sendirinya, melainkan dilatarbelakangi sejumlah faktor utama, yakni faktor:

- (1) Psikologis berupa trauma terhadap anarkisme,
- (2) Kultur yang mengutamakan primordialisme
- (3) Politik yang mewariskan diskriminasi
- (4) Sosial yang mudah dilanda konflik
- (5) Ekonomi berupa kesejahteraan yang tidak merata



Faktor-faktor tersebut lebih cenderung menghasilkan interaksi yang senantiasa **berjarak** atau **tidak langsung** (dibatasi trauma psikologis, sikap eksklusivisme yang bersumber dari primordialisme, stigmatisasi dan *prejudice* yang bersumber dari politik yang diskriminatif, sikap protektif dan menutup diri akibat kondisi sosial yang sewaktu-waktu bisa dilanda konflik, kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi) sehingga bila terjadi interaksi, intensitasnya rendah dan hanya bersifat insidental. Dengan demikian, interaksi berjarak atau tidak langsung (*dissociate* dan *detach*) seperti itu lebih berpotensi menciptakan disharmoni sosial daripada harmoni sosial.

Sedangkan tempat tinggal yang hanya difungsikan sebagai tempat beristirahat atau tempat melepas lelah di malam hari setelah sehari penuh melakukan aktivitas juga berpotensi menghasilkan interaksi dengan intensitas rendah dan bersifat insidental. Waktu yang tersedia hanya digunakan untuk tinggal dan beristirahat di dalam rumah, tidak dialokasikan untuk aktivitas di luar rumah. Walaupun ada undangan atau ajakan untuk berpartisipasi dalam suatu aktivitas di luar rumah, partisipasi dilakukan secara tidak langsung berupa partisipasi finansial, bukan ikut serta berpartisipasi secara personal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3  
Model dan Intensitas Interaksi di Lingkungan Tempat Tinggal

Lokasi	Interaksi	Intensitas interaksi	
		Intensif	Insidental
Tempat tinggal	tidak langsung	-	+
	alokasi waktu terbatas	-	+
	tidak personal	-	+
	partisipasi finansial	-	+
Tempat kerja	Langsung	+	-
	alokasi waktu banyak	+	-
	Personal	+	-
	partisipasi fisik	+	-

Sumber : Olahan data primer tahun 2007

Di sisi lain, data yang ada mengindikasikan bahwa interaksi antara warga Kota Makassar keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar di lingkungan tempat kerja memiliki intensitas yang lebih tinggi (lebih intensif) dibanding interaksi di lingkungan tempat tinggal. Hal itu dilatarbelakangi faktor:

- (1) Adanya ikatan (*associate*)
- 2) Rutinitas kerja
- (3) Saling tergantung (*mutual reliant*)
- (4) Tujuan yang sama (*shared goal*)
- \*5) Tersedia ruang (*space*)

Interaksi antara warga keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar yang terjalin karena ikatan kerja, pada awalnya mungkin hanya bersifat mekanistik, tidak setara (majikan-karyawan), dan sekadar memenuhi tuntutan pekerjaan. Namun demikian, interaksi yang terjalin secara rutin di tempat kerja, disertai adanya tujuan bersama (mencari nafkah) dan saling tergantung dan mengandalkan, meningkatkan pula intensitas interaksi di antara kedua etnik tersebut di lingkungan tempat kerja. Dengan kata lain, tempat kerja menjadi semacam ruang publik

(*social space*) bagi terjalinnya interaksi yang intensif antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar (Tabel 4).

Tersedianya *space*, terjadinya interaksi secara reguler, serta pihak yang terlibat dalam interaksi saling tergantung dan saling mengandalkan untuk mencapai tujuan bersama adalah faktor-faktor yang juga berpeluang menciptakan interaksi secara langsung, personal, melibatkan partisipasi fisik, dan dalam jangka waktu yang panjang. Interaksi tanpa jarak (*associate* atau *attach*) seperti itu tentu saja lebih berpotensi menciptakan harmoni sosial daripada disharmoni sosial di lingkungan tempat kerja.

Analisis tentang interaksi di lingkungan tempat tinggal dan di lingkungan kerja di atas mengindikasikan bahwa intensitas interaksi sosial yang tinggi (intensif) memiliki hubungan positif dengan harmoni sosial dan berhubungan negatif dengan disharmoni sosial. Sedangkan intensitas interaksi sosial yang rendah (insidental) memiliki hubungan positif dengan disharmoni sosial dan berhubungan negatif dengan harmoni sosial (Tabel 4 dan Tabel 5).

Tabel 4  
Hubungan Lokasi Interaksi dengan Intensitas Interaksi

Lokasi	Interaksi	Intensitas interaksi	
		Intensif	Insidental
Tempat tinggal	Tidak langsung	-	+
	alokasi waktu terbatas	-	+
	Tidak personal	-	+
	partisipasi finansial	-	+
Tempat kerja	Langsung	+	-
	alokasi waktu banyak	+	-
	Personal	+	-
	partisipasi fisik	+	-

Sumber : Olahan data primer tahun 2007

Tabel 5  
Hubungan Lokasi Interaksi dengan Intensitas Interaksi

Lokasi Interaksi	Intensitas interaksi	Harmoni	Disharmoni
Tempat tinggal	rendah (insidental)	-	+
Tempat kerja	tinggi (intensif)	+	-

Sumber : Olahan data primer tahun 2007

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensitas interaksi yang tinggi atau interaksi sosial yang intensif berhubungan dengan probabilitas terciptanya harmoni sosial dan tidak berhubungan dengan probabilitas terciptanya disharmoni sosial. Sebaliknya, intensitas interaksi sosial yang rendah atau interaksi sosial yang bersifat insidental berhubungan dengan disharmoni sosial dan tidak berhubungan dengan harmoni sosial. Dengan demikian **intensitas** interaksi sosial merupakan **faktor kunci** bagi terciptanya harmoni dan disharmoni sosial.

#### IV. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

##### 4.1.1. Intensitas Interaksi Sosial

Intensitas interaksi sosial yang terjadi di lingkungan tempat kerja lebih intensif dibandingkan interaksi di lingkungan tempat tinggal. Selain disebabkan pengaruh nilai budaya yang diuraikan di atas, hal itu juga berkaitan dengan kecenderungan warga Makassar keturunan Tionghoa untuk bermukim secara berkelompok dengan sesama mereka di suatu lokasi tertentu. Dalam kondisi seperti itu, kecil

kemungkinan bagi warga keturunan Tionghoa untuk bertemu dan berinteraksi dengan etnik Makassar di lingkungan tempat tinggal mereka.

Namun, di sisi lain, warga Tionghoa di Makassar yang pada umumnya menggeluti dunia usaha atau bisnis, ternyata rata-rata mempekerjakan etnik Makassar dalam usaha atau bisnis yang mereka kelola. Oleh karena itu, lingkungan tempat kerja juga berfungsi sebagai ruang sosial bagi warga keturunan Tionghoa untuk berinteraksi dengan warga etnik Makassar.

#### 4.1.2. Faktor yang Mendorong Interaksi Sosial

Ada dua faktor utama yang memengaruhi interaksi antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar. Kedua faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai **faktor internal** dan **faktor eksternal**.

Faktor internal yang berperan dalam membentuk interaksi sosial yang harmonis ataupun disharmonis adalah:

- (1) kemampuan individu untuk berkomunikasi;
- (2) tingkat pendidikan;
- (3) sikap dan pola pikir dalam menghadapi perbedaan, sikap dan pola pikir yang terbuka atau tertutup terhadap berbagai perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama dan nilai-nilai budaya yang dianut.

Adapun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap interaksi sosial antara etnik keturunan Tionghoa dan etnik Makassar adalah:

- (1) Warisan dari kondisi sosial pada masa kolonial yang membeda-bedakan dan mengistimewakan status sosial warga keturunan Tionghoa, yang mengakibatkan warga etnik Makassar yang merasa sebagai warga pribumi memendam rasa tidak puas dan menaruh antipati terhadap etnik keturunan Tionghoa;
- (2) Kondisi sosial politik pasca-G 30 S/PKI yang kemudian melahirkan stigmatisasi terhadap warga keturunan Tionghoa (yang terjadi selama masa pemerintahan rezim Orde Baru), yang berakibat pada pengucilan dan pembatasan ruang gerak (sosial, politik, dan budaya) terhadap warga keturunan Tionghoa;
- (3) Adanya kesenjangan ekonomi antara warga dari etnik keturunan Tionghoa dengan warga etnik Makassar yang menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat warga etnik Makassar mudah disulut untuk melakukan aksi anarkistis terhadap etnik keturunan Tionghoa.

#### 4.1.3. Pengaruh Nilai Budaya

Sebagai dua etnik berbeda, adalah wajar apabila etnik Tionghoa dan etnik Makassar memiliki latar belakang budaya berbeda, sehingga masing-masing menganut nilai-nilai budaya yang berbeda pula. Hal itu kemudian akan berpengaruh pada model interaksi sosial di antara mereka, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan tempat kerja.

Nilai budaya Tionghoa yang memandang

bahwa budaya mereka merupakan pengejawentahan dari suatu nilai tertinggi dari nilai-nilai budaya lainnya, sehingga anggapan warga keturunan Tionghoa bahwa kedudukan dan posisi mereka dalam strata sosial masyarakat adalah terpendang. Hal ini diperkuat oleh perlakuan kolonial yang menempatkan mereka pada kedudukan lapisan menengah. Nilai lain yang mereka anut adalah memulai aktivitas usaha sepagi mungkin, membuat mereka meninggalkan tempat tinggal sejak fajar dan menghabiskan waktu sehari-hari di tempat kerja, membuat mereka tidak sempat bersosialisasi di lingkungan tetangga pada siang hari. Pada malam hari, mereka pulang ke kediaman mereka dalam keadaan letih, sehingga malam hari dimanfaatkan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga untuk melanjutkan aktivitas keesokan harinya. Akibatnya, mereka pun tidak sempat bersosialisasi dengan tetangga pada malam hari.

Secara kultural, etnik Makassar mengutamakan partisipasi langsung setiap individu dalam interaksi sosial, termasuk di lingkungan tempat tinggal, sebagai wujud nilai saling menghargai. Bila ada aktivitas di lingkungan tempat tinggal, misalnya, kehadiran setiap warga secara fisik dan personal dijadikan sebagai tolok ukur dari keseriusan warga dalam berinteraksi dengan sesama tetangga. Partisipasi tidak langsung seperti pemberian bantuan dana dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, kadang-kadang justru ditanggapi secara negatif dan dianggap sebagai suatu

bentuk keangkuhan, penonjolan kekayaan, dan wujud keengganan untuk berinteraksi dengan sesama tetangga. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang dianut pun berperan penting dalam menciptakan interaksi sosial yang harmonis maupun yang disharmonis.

#### 4.1.4. Upaya Mendorong Interaksi Sosial

Momen reformasi dan diberlakukannya Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang penting guna mendorong terciptanya interaksi sosial yang lebih baik antara warga keturunan Tionghoa dengan warga dari etnik Makassar. Momen tersebut dapat diisi dengan bersama-sama berupaya membangun kesadaran baru bahwa situasi sudah berubah.

Salah satu cara untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis adalah dengan belajar mengenali budaya orang lain, yang tentu akan memperlihatkan adanya perbedaan. Perbedaan itulah yang harus saling dipahami, selain itu perlu pula ditumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang saling membutuhkan sehingga setiap orang perlu saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Juga perlu disadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga orang lain dibutuhkan guna saling menutupi kekurangan.

Untuk itu, perlu digalakkan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan berbagai etnik dan agama, agar mereka terbiasa dengan interaksi multietnik. Selain itu perlu ada

pemahaman dan pengamalan dari masing-masing pemeluk agama di Makassar tentang konsep ajaran kasih sayang antarsesama makhluk Tuhan, karena setiap agama memiliki konsep seperti itu. Jika hal tersebut dapat diterapkan bersama maka tidak akan ada lagi sikap dan tindakan saling mengecilkan atau menghinakan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan kasih sayang antara mayoritas dan minoritas, etnik yang satu dengan etnik lainnya, dan seterusnya akan menciptakan interaksi sosial yang cair dan harmonis.

#### 4.1.5. Pengaruh Konflik terhadap Interaksi Sosial

Jika dirunut secara historis, ada beberapa faktor yang kerap melatarbelakangi atau menjadi pemicu konflik antara etnik keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar. *Pertama*, warisan dari masa kolonial yang menempatkan warga keturunan Tionghoa pada status sosial lebih tinggi dibanding etnik Makassar. Akibatnya, warga etnik Makassar yang merasa sebagai warga pribumi memendam ketidakpuasan dan rasa antipati terhadap etnik keturunan Tionghoa. Perbedaan status sosial seperti itu kemudian berlanjut menjadi segregasi antara pribumi dan nonpribumi serta segregasi berdasarkan suku, agama, dan ras (sara).

*Kedua*, kondisi sosial politik pada masa Orde Baru menyusul pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang didukung oleh pemerintah Republik Rakyat China yang

berhaluan komunis. Ekses dari peristiwa tersebut adalah warga keturunan Tionghoa mengalami stigmatisasi selama masa pemerintahan rezim Orde Baru, yang berakibat pada pembatasan ruang gerak (sosial, politik, dan budaya) terhadap warga keturunan Tionghoa, sehingga mereka cenderung menutup diri.

*Ketiga*, adanya kesenjangan ekonomi dewasa ini antara warga dari etnik keturunan Tionghoa dengan warga etnik Makassar yang menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat warga etnik Makassar mudah disulut untuk melakukan aksi anarkistis terhadap etnik keturunan Tionghoa sehingga mereka cenderung menarik diri dari interaksi sosial.

#### 4.1.6. Proposisi hipotesis atau Asumsi-asumsi dasar

Pada akhirnya studi ini mengemukakan dan merumuskan beberapa proposisi atau asumsi-asumsi yang dapat ditindaklanjuti untuk penelitian selanjutnya. Proposisi atau asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1). Harmoni etnis dapat tercipta, jika terjadi interaksi dalam berbagai kegiatan dilingkungan komunal dan di tempat kerja, dan disharmoni etnis terjadi, bila kedua etnik saling menutup diri, tidak menciptakan interaksi, memelihara prasangka dan stereotipe masing-masing etnik,
- (2) Interaksi warga keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar, kurang intens terjadi di

- lingkungan tempat tinggal, karena masing-masing hidup secara berkelompok. Warga keturunan Tionghoa menutup diri, dengan simbol bentuk rumah yang tertutup, menjunjung dan memelihara budaya, sementara etnik Makassar memendam stigma dan *prejudice* bahwa etnik keturunan Tionghoa egois dan hanya mementingkan untung rugi bila berhubungan dengan tetangga.
- (3) Interaksi lebih sering terjadi di tempat kerja karena umumnya kedua etnik saling bertemu dalam satu kepentingan dan tujuan yang sama yang terikat oleh adanya saling ketergantungan.
- (4) Disharmoni terjadi karena minimnya kesadaran kedua etnik untuk saling membuka diri dan membaur dalam kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal.
- (5) Perbedaan ciri fisik telah melibas kesadaran satu Indonesia dari suatu keinginan bersama untuk menjadi satu, yang artinya lebih luas adalah pengakuan satu bangsa itu masih didominasi oleh paham egocentris terhadap rasa memiliki negeri ini.
- (6) Kesamaan agama bukan jaminan untuk melakukan amalgamasi (kawin campur) dan juga sekaligus bukan jaminan untuk meminimalisasi disharmoni.
- (7) Kecemburuan ekonomi yang kental menjadi pembeda dan berujung pada kondisi disharmoni.
- (8) Jarak sosial terjadi karena adanya saling prasangka, stigma dan adanya stereotipe kedua etnik (Makassar dan keturunan Tionghoa).
- (9) Kesadaran politik belum seluruhnya dimiliki oleh warga keturunan etnik Tionghoa, yaitu kurang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- (10) Interaksi sosial yang terjadi di lingkungan komunal dan lingkungan kerja, membentuk suatu pola yang dapat menciptakan harmoni dan disharmoni sosial.
- (11) Pola-pola hubungan sosial yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dapat menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan publik, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.
- (12) Takoh (elit) Masyarakat kedua etnis sangat berperan untuk menciptakan harmoni dan berperan pula untuk mencegah disharmoni.
- (13) Konflik kedua pihak, bila tidak ditangani dengan saksama oleh pemerintah, tokoh masyarakat, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan ketenteraman, lambat laun akan mengganggu kedamaian, bahkan mengarah ke perpecahan kelompok masyarakat.

#### 4.2. Saran

Beberapa saran yang ditarik dari hasil studi ini mempunyai dua implikasi, yaitu untuk kepentingan akademis dan praktis untuk penanganan hubungan antaretnik di perkotaan khususnya di kota Makassar ataupun untuk daerah lain di Indonesia.



#### 4.2.1. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Implikasi teoritik dari temuan studi tentang harmoni dan disharmoni sosial dalam interaksi sosial antara warga Makassar keturunan Tionghoa dengan etnik Makassar ini, disarankan bagi komunitas ilmiah adalah sebagai berikut:

- (1) Diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menambah khazanah pengembangan ilmu sosial, khususnya bidang ilmu sosiologi. Diharapkan pula, dapat dijadikan acuan awal untuk mendalami studi hubungan antaretnik di perkotaan.
- (2) Proposisi dan asumsi-asumsi yang dirumuskan dalam simpulan penelitian ini, dapat dikembangkan untuk suatu penelitian yang lebih fokus membicarakan hubungan antaretnik Makassar dan keturunan Tionghoa di kota Makassar. Juga, dapat menjadi referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang kehidupan masyarakat kedua etnik yang heterogen dan memiliki permasalahan yang kompleks.

#### 4.2.2. Untuk Pemerintah dan Institusi lainnya.

Implikasi studi ini untuk kepentingan instansi pemerintah atau lembaga lain yang ingin membuat kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antaretnik di perkotaan, berupa saran praktis dan teknis-implementatif untuk penyusunan dan penerapan regulasi hubungan etnik di perkotaan adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk menciptakan harmoni, ada baiknya

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, saat ini lebih disosialisasikan sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan tidak lagi kita pertentangkan perbedaan yang terjadi. Undang-undang tersebut pada dasarnya sangat positif untuk menyamakan persepsi kewarganegaraan kita, hanya saja implikasinya belum tersentuh hingga ke lapisan bawah, kelas masyarakat yang sangat mudah terprovokasi. Makanya, undang-undang ini jangan hanya dimengerti dan diperuntukkan bagi segelintir orang saja atau hanya untuk elite etnik Tionghoa saja, tapi seluruh elemen masyarakat.

- (2) Memberi pemahaman kepada semua elemen masyarakat untuk menghargai dan menikmati kreasi Ilahi tentang perbedaan yang ada di antara manusia. Selain itu, perlu juga intensitas pemuka agama, khusus Islam, bagaimana menjabarkan Islam yang tidak memiliki sedikit pun niatan untuk menyakiti orang atau pemeluk agama lain. Hal ini penting agar semua elemen tidak menjadikan perbedaan itu sebagai ujung tombak perpecahan untuk memperoleh kenikmatan sesaat. Begitu pula, mereka yang menjadi elite di komunitas masing-masing, termasuk pemuka agama selain Islam, agar memasyarakatkan pentingnya kebersamaan tanpa menyudutkan orang lain dan menunjuk diri sendiri sebagai yang terbaik.

- (3) Untuk menghindari munculnya anarkisme

atau disharmoni kelak, ada baiknya sudah disiapkan secara dini dengan memberi pemahaman sejarah, kemanusiaan, dan kekayaan makna dari perbedaan kepada anak-anak usia dini dan juga kaum remaja. Para pemuka etnik harus melibatkan diri untuk tidak henti-hentinya memberi contoh yang baik tentang pentingnya menciptakan kehidupan harmoni.

- (4) Masyarakat yang hidupnya terbelakang dan berada di bawah garis kemiskinan atau kelas marginal, perlu disentuh oleh semua elite-elite masyarakat yang memberi pengertian dan pencerahan tentang pentingnya kehidupan bersama untuk membangun negeri ini menjadi damai dan sejahtera.
- (5) Hentikan praktik-praktik yang mengarah kepada tindakan "pemerasan" terhadap warga keturunan Tionghoa yang punya urusan dengan suatu instansi atau warga keturunan Tionghoa, dijadikan "sapi perah" dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan pemerintah di Makassar.
- (6) Hukum segera ditegakkan jika terjadi suatu kasus atau peristiwa yang melibatkan warga keturunan Tionghoa yang berindikasi akan terjadinya konflik atau *chaos*.
- (7) Perlu regulasi tentang pengaturan hubungan kerja bagi kedua etnik yang tidak menguntungkan hanya satu pihak saja, khususnya dalam masalah pembantu rumah tangga.
- (8) Regulasi yang mengatur kehidupan bersama

antaretnik belum tersosialisasi secara baik dan maksimal.

- (9) Dalam menangani konflik etnik, tidak lagi bersifat parsial, akan tetapi harus ditangani secara holistik dan integratif, dengan berpegang pada peraturan yang ada.

#### 4.2.3. Untuk warga keturunan Tionghoa.

Saran praktis agar di implementasikan oleh warga keturunan Tionghoa adalah sebagai berikut:

- (1) Agar warga keturunan Tionghoa, hendaknya menghilangkan salah pengertian warga masyarakat terhadap mereka, seperti orang keturunan tidak patriotik, tidak mau membaur, hanya memikirkan materi, serakah. Untuk menghilangkan hal tersebut warga keturunan Tionghoa senantiasa berupaya membangun komunikasi dua arah, di lingkungan tempat tinggal, maupun di lingkungan tempat kerja, dengan maksimal.
- (2) Interaksi perlu diintensifkan, dengan melibatkan diri dalam kegiatan peringatan hari nasional di lingkungan tempat tinggal dan di tempat kerja. Keterlibatan materi sebagai pengganti diri, hendaknya diminimalisasi.
- (3) Warga keturunan Tionghoa, hendaknya memperlakukan pekerja mereka secara manusiawi, dengan memberikan upah sesuai standar upah yang berlaku, serta memperhatikan dan memberikan jaminan kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian,

karena beberapa konflik kekerasan yang telah terjadi selalu bersumber dari hubungan majikan-pekerja.

#### 4.2.4. Untuk warga masyarakat bukan warga keturunan Tionghoa

- (1) Hentikan rasa sentimen yang selalu menganggap bahwa warga keturunan Tionghoa sebagai "kambing hitam", "biang kerok" kalau terjadi krisis ekonomi.
- (2) Hilangkan prasangka bahwa warga keturunan Tionghoa tidak mau membaur dikarenakan kesibukan mengurus dagangannya.
- (3) Hentikan rasa curiga berlebihan terhadap masyarakat etnik keturunan Tionghoa.
- (4) Jangan mudah terprovokasi bila terjadi suatu kasus yang melibatkan warga keturunan Tionghoa.
- (5) Harus saling menghormati kebudayaan masing-masing.
- (6) Hentikan pemikiran bahwa warga keturunan bukan bangsa sendiri.

#### Daftar Pustaka

##### Buku-Buku:

- Abdullah, Hamid, 1985. *Manusia Bugis Makassar*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Abidin, andi Zainal, 1999. *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Hasanuddin University Press, UjungPandang.
- Awaluddin Yusuf, Iwan: *Media, Kematian dan Identitas Budaya Minoritas*, UII Press Jogjakarta, 2005.
- Anderson R.J and Sharrock W.W, 1984. *Applied Sociological Perspectives*, George Allen end UNWIN, London.
- Ali, Husin, S, 1985. *Rakyat Melayu, Nasib dan Masa Depan*. Inti Sarana Aksara, Jakarta.
- Bahrum, Shaifuddin, 2003. *Cina Peranakan Makassar, Pembauran Melalui Perkawinan Antarbudaya*, Yayasan Baruga Nusantara, Makassar.
- Baldassare, Mark, 1994. *The Los Angeles Riots*, Westview Press, San Francisco.
- Baqir Zein, Abdul, 2000. *Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Penerbit Prestasi Insan Indonesia Jakarta.
- Banton, Michael, 1967. *Race Relation*, London, Tavistock Publication Limited.
- Barkan, Steven E and Snowden, Lynne L , 2001. *Colective Violence*, Allyn and Bacon, Singapore.
- Barth, Earnest A. T & Noel, Donald L, 1980. *Conceptual Framework For The Analysis of Race Relation: an Evalution*. Dalam Thomas F. Pettigraw (ed),. *The Sociology of Race Relation: Replection and Freform*, New York: The Free Press.
- Barth, Fredrik, 1988. *Kelompok Etnik dan B a t a s a n n y a* , U I Press, Jakarta, 1988.
- Berger, Peter L dan Luckmann, Thomas, 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta.
- Berghe, Pierre Van Den, 1967. *Race and Racism: A Comparative Perspective*, New York London-Sydney: John Wiley & Sons.
- Blalock, Hubert M, Jr; 1987. *Pengantar Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bluth, B.J, 1982. *Parsons` General Theory of Action A Summary The Basic Theory*, Granada Hills, California.
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Brass, Paul R, 1996. *Riot and Pogroms*, New York University Press, New York.
- Brown, Michael E and Ganguly, Sumit , 1997. *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific*, The MIT Press, England.
- Boyle, Francis A, 1996. *Genocide*, Aletheia Press.
- Bottomore T.B. 1972. *Sociologi a Guide to Problems and Literature*, Unwin University Books, London.
- Budiman, Hikmat, 2005. *Hak Minoritas, Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrasindo Persada, Jakarta.
- Burgess, Robert G, 1986. *Key Variables in Social Investigation*, Routledge and Kegan Paul PTC, London.
- Camara, Dom Helder, 2000. *Spiral Kekerasan*, Insist Press, Yogyakarta.
- Campbel, Tom, 1994. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Kanisius, Jakarta.
- Charon, Joel M, 1979. *Symbolic Interactionism an Introduction an Interpretation, an Intergration*, Prentice-Hall, London.
- Coser Lewis A, 1968. *Continuities in The Study Of Social Conflict*, The Free Press, New York.
- \_\_\_\_\_ 1964. *The Functional of Social Conflict*, The Free Press, New York.
- Crawford, Beverly and Lipschutz, Ronnie D, 1998. *The Myth of Ethnic Conflict*, The Regents of The University of California, Berkeley.
- Christie, Kenneth, 1998. *Ethnic Conflict, Tribal Politics A Global Perspective*, Curzon Press.
- Coppel, Charles A, 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Colombiyn, Freek and Lindblad, J. Thomas (ed), 2002. *Roots Of Violence in Indonesia, Contemporary Violence in Historical perspective*, Kitlv Press, Leiden.
- Creswell, John W , 1994. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publications.
- Cuff, EC and Payne, GCF, 1984. *Perspectives In Sociology*, George Allen and Anwin, London.
- Cushman, Jennifer dan Gungwu, Wang, 1991. *Perubahan Identitas Orang Cina Di Asia Tenggara*, PT.Pustaka UtamaGrafiti, Jakarta.
- Dahrendorf, Ralf, 1968. *Essays in the Theory of Society*, Stanford University Press, California.
- Das, Veena, at all, 2001. *Remaking A World, Violence, Soscial Suffering, and Recovery*, University of California Press, Barkley and Los Angeles, California.
- \_\_\_\_\_ 2000. *Violence and Subjectivity*, University of California Press, London.
- David CL. Chung, 1995. *Sukses Bisnis Cina di Perantauan*, Penerbit Bina Aksasra, Jakarta.
- Diamon, Larry and Plattner, Marc F, 1994. *Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy*, The Johns Hopkins University Press, Maryland.
- Durkheim, Emile, 1938. *The Rules of Sociological Method*, The University of Chicago.
- E Simpson, George dan Yinger, J. Milton. 1965. *The Sociology of Race and Ethnic relation.*, Dalam Robert K. Merton (ed) *Sociology Today: Problems and Prospect*. Vol II. New York and Evastone: Harper Torcbooks.
- Faisal, Sanapiah, 2005. *Format-Format Penelitan Sosial*, P T. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Faruk , dkk, 2000. *Perlawanan Atas Diskriminasi Rasial-Etnik*, Yayasan Indonesia Tera, Magelang.
- Fenton, Steve, 1999. *Ethnicity, Racism, Class and Culture*, Rowman dan Littlefield Publisher, Inc, Lanham-Boulder-New York.
- Fern, Edward F, 2001 *Advanced Focus Group Research*, Sage Publications, London.

- Fisher, Simon at all, 2000. ***Working With Conflict: Skills Et Strategies For Action***, Zed Books Ltd, London 2000, diterjemahkan oleh SN. Karikasari dkk, dengan judul *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk bertindak*, the British Council, Jakarta.
- Frisby, David and Sayer, Derek, 1906. ***Society***, Ellis Horwood, England.
- Giddens, Anthony, 1995. ***Politics, Sociology and Social Theory***, Stanford University Press, California.
- Giddens, Anthony and Held, David, 1982. ***Classes, Power, and Conflict***, University of California Press, Los Angeles.
- Geertz, Clifford, 1973. ***The Interpretation of Cultures***, Basic Books, New York.
- Gerth, Hans H (editor), 1968. ***The Religion of China, Max Weber***, A Free Press Paper Back, Macmillan Publishing.
- Glazer, Nathan dan Moynihan, Daniel P (ed), 1975. ***Ethnicity, Theory and Experience***, Harverd University Press, Cambridge-Massachusetts and london, England.
- Gurr, Ted Robert, 1998. ***Minorities, A Global View of Ethnopolitical Conflict At Risk***, United States Institute of Peace Press, Washinton DC.
- Greif, Stuart W, 1991. ***WNI Problematika Orang Indonesia Asal Cina***, Grafitti Press, Jakarta.
- Habib, Achmad, DR,MA, 2004. ***Konflik Antaretnik Di Pedesaan, Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa***, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2004.
- Hall, Harold V and Whitaker, Leighton C, 1999. ***Collective Violence Effective Strategies For I Assessing and Interviewing, in Fatal Groupand Institutional Aggression***, CRC Press, New York.
- Harris, Marvin : Cultural Materialism, 1980. ***The Struggle For A Science Of Culture***, Random House, New York.
- Hassan Shadily, 1993. ***Sosiologi untuk masyarakat di Indonesia*** Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Hidayat Z.M, 1977. ***Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia***, Tarsito, Bandung.
- Horowitz, Donald L, 1985. ***Etnic Group in Conflict***, University of California Press, Berkeley.
- Irawan, Prasetya, Dr.M.Sc; 2006. ***Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial***, DIA Fisip UI, Jakarta.
- J.L. Vleming Jr. 1988. ***Kongsi dan Spekulasi, Jaringan Kerja Bisnis Cina***, Graffiti Press, Jakarta.
- Jahja, Junus, 1983. ***Garis Rasial Garis Usang***, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB) Pusat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1984. ***Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa***, Yayasan Ukhuwah Islamiyah, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1991. ***Nonpri Di Mata Pribumi***, Yayasan Tunas Bangsa, Jakarta.
- Jandt, Fred E and Pedersen, Paul B, 1996. ***Construktive Conflict Management Asia- Pacific Cases***, Sage Publication, London.
- Jamuin, Ma'arif, 1999. ***Manual Advokasi, Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama***, CISCORE, Solo.
- Johnston, Hank and Klandermans, Bert, 1995. ***Social Movements and Culture***, The Regents of The University of Minnesota.
- Ju Lan, Thung dkk; 2000. ***Etnisitas Dan Integrasi Di Indonesia, Sebuah Bunga Rampai***, LIPI, Jakarta.
- Kakar, Sudhir, 1996. ***The Colors Of Violence***, The University Of Chicago Press, London.
- Kartika, Sandra dan Mahendra, M, 1999. ***:Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Multikultural Dalam Media***, Lembaga Studi Pers & Pembangunan, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1986. ***Pengantar Metodologi Riset Sosial***, PT Alumni, Bandung.

- Kelley, Harold H and Thibaut, Jhon W, 1978. *Interpersonal Relations*, John Wiley and Sons, New York.
- Krueger, Richard, 1988. *Focus Groups, A Practical Guide For Applied Research*, Sage Publication, London.
- Koentjaraningrat, 1980. *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat dan Emmerson, Donald K, 1982. *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kymlicka, Will, 1995. *Multicultural Citizenship*, Oxford University Press, New York.
- Kusni, JJ, 2001. *Negara Etnik, Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak*, FuSPAD, Yogyakarta.
- Laitin, David D, 1986. *Hegemoni and Culture*, The University Of Chicago Press, London.
- Latif, Sukriansyah S dan Leban, Tomi, 1988. *Amuk Makassar*, ISAI, Jakarta.
- Labovitz, Sanford and Hagedorn, Robert, 1982. *Metode Riset Sosial*, Erlangga, Jakarta.
- Leatherman, Janie dkk, 1999. *Breaking Cycles Of Violence*, Kumarian Press, America.
- Lewicki, Roy J at all, 1999. *Negotiation*, Irwin McGraw Hill, New York.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Essentials Of Negotiaton*, McGraw-Hill, London.
- Linn, Robert L and Erickson, Frederick, 1990. *Quantitative Methods and Qualitative Methods*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Mackie, J.A.C. and Charles A.Coppel, 1976. *The Chinese in Indonesia*, Honolulu University Press, Hawaii.
- Moleong, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Marshall, Catherine and Rossman, Gretchen, 1989. *Designing Qualitative Research*, Sage Publishing, London.
- Masyhuri, 2006. *Bakar Pecinan, Konflik Pribumi vs Cina di Kudus tahun 1918*, editor Hasyim Asy'ari, Grafika Indah, Jakarta.
- Mattulada, 1978. *Menyusuri Jejak Makassar*, LEPHASUNHAS, Ujungpandang.
- McGarry, John and O'Leary, Brendan, 1993. *The Politic of Ethnic Conflict Regulation*, Routledge, New York.
- Miall, Hugh dkk, 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moore, Erin, 1985. *Conflig and Compromise Justice in an Indian Village*, University Press of America, London.
- Mulder, Niels, 1983. *Jawa-Thailand, Beberapa Perbandingan Sosial Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muslimin A.R.Effendi, 2004. *Tionghoa Makassar di Tengah Pusaran Sejarah*, In, (eds. By Dias Paradadimata & Muslimin A.R.Effendi) *Kontituritas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan, Ombak*, Yogyakarta.
- Nasikun, 1984. *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, S. Prof.DR; 1982. *Metode Research*, Jemmars, Bandung.
- Nisbet, Robert A, 1966. *The Sosiological Tradition*, Heinemann, London.
- Nur Zain Hae, Rusdi Marpaung, Hawe Setiawan, 2000. *Konflik Multikultur*, Panduan Meliput Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta.
- Pallawa, Andhy dan Azis, Asfat, 2003. *Pembauran Di Makassar, Agenda Yang Tertinggal*, Global Publishing, Makassar.
- Pardede, Andrea, dkk.; 2002. *Antara Prasangka dan Realita, Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia*, Pustaka Inspirasi, Jakarta.
- Peter S.Li, 1988. *Ethnic Inequality in A Class Society*, Wall Thompson, Toronto.
- Poelinggomang, Edward L, 2002. *Makassar Abad XIX*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Punch, Keith F, 1988. : *Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches*, Sage



- Publishing, London.
- Purcell, Victor, 1965. *The Chinese in Southeast Asia*, Oxford University Press, Kualalumpur.
- Rex and Mason, 1986. *Theories of Race and Ethnic Relation*, Cambridge University Press.
- Ritzer, George, 1986. *Contemporary Sociological Theory*, Second Edition, McGraw Hill International Edition, London..
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, 2004 *Teori Sosiologi Modern*, edisi keenam, Prenada Media, Jakarta.
- Ross, Marc Howard, 1993. *The Culture of Conflict*, Yale University Press, New Haven and London.
- Rosenberg, Marshall, 1999. *Nonviolent Communication A Language of Compassion*, Puddle Dancer Press, America.
- Robboy, Howard and Clark, Candace, 1983. *Social Interaction Reading in Sociology*, St Martin`s Press, New York.
- Roberts K, at all, 1977. *The Fragmentary Class Structure*, Heinemann, London.
- Sa'dun M, Moch, 1999. *Pri dan Nonpri, Mencari Formasi Baru Pembangunan*, P T. P u s t a k a Cidesindo, Jakarta.
- Schermerhorn RA, 1978. *Comparative Ethnic Relation A Framework for Theory and Research*, The University of Chicago Press, London.
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Southall, Aidan at all, 1985. *City And Society, Studi In Urban Ethnicity, Life, Style And Class*, University Of Leiden, Leiden.
- Steve Duck, 1986. *Human Relationships, an Introduction to Social Psychology*, Sage Publications, London, 1986.
- Stinchcombe, Arthur L 1968. *Constructing Social Theories*, The University of Chicago press, London.
- Suryadinata, Leo, 1988. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa Di Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2002. *Negara Dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1997. *Ethnic Chinese as Southeast Asians, Institute Of Southeast Asian Studies*, Singapore,
- \_\_\_\_\_ 1990. *Mencari Identitas Nasional, Dari Tjoe Bon Son sampai Yap Thiam Hiam*, LP3ES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1984. *Dilemma Minoritas Tionghoa*, Graffiti Pers, Jakarta.
- Susetiawan, 2000. *Konflik Sosial, Kajian Sosialogis Hubungan Buruh Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1984. *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi Kebijakan Hidup Jawa*, Gramedia, Jakarta.
- Svalastoga, Kaare, 1989. *Deferensiasi Sosial*, Bina Aksara, Jakarta.
- Taher, Tarmizi, DR, 1977. *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional Dan Integrasi Bangsa Di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Jakarta.
- Tambiah, Stanley J, 1996. *Leveling Crowds*, University Of California Press, London.
- Tan, Mely G, 1976. *A. Historical Sketch of the Chinese in Indonesia*, Jakarta, LEKNAS-LIPI.
- \_\_\_\_\_ dkk, 1999. *Etnisitas Dan Konflik Sosial*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Jakarta,
- \_\_\_\_\_ 1981. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, PT.Gramedia, Jakarta.



- \_\_\_\_\_ 1996. *Usaha Ekonomi Etnis Cina di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis dalam Etika Bisnis Cina*, Jakarta: PCP Universitas Nasional dan Gramedia..
- Taylor, Donald M and Moghaddam, Fathali M, 1994. *Theories Of Intergroup Relations*, Westport Connecticut, London.
- Taylor, Steven J and Bogdan, Robert, 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods, The Search For Meanings*, Wiley Interscience, New York.
- Theodorson, George A & Achilles G.T, 1969. *Modern Dictionary of Sociology*, Barnes & Noble Books, New-York.
- Thompson, Kenneth and Tunstall, Jeremy : *Sociological Perspective*, Penguins Book,Ltd, England, 1983.
- Turner, Jonathan H, 1978. *The Structur of Sociologi Theory*, The Dorsey Press, Chicago, Illinois.
- \_\_\_\_\_ 1989. *Theory Building in Sociology*, Sage Publications, London.
- Turner, Jonathan and Maryanski, Alexandra, 1979. *Functionalism*, The Benyamin/Cumming Publishing Company, California.
- Walkodri dan Juyoto, Djudjuk, 1985. *Pembauran Bangsa, Suatu Konsep-Konsep Pemikiran*, CV.Nurchahaya, Yogyakarta.
- Walzer, Michael, 1997. *On Toleration*, Vail Ballou Press, Binghamton New York..
- Warwick, Donald P at all, 1975. *The Sample Survey: Theory And Practice*, McGraw Hill Book, New York.
- Water, Mary C, 1990. *Ethnic Options Choosing Identities in America*, University Of California Press, Los Angeles.
- Water, Malcolm, 1994. *Modern Sociological Theory*, Sage Publications, London.
- Watson, C.W, 2000. *Multiculturalism*, Open University Press, Philadelphia.
- Wahono, Riyanto D :*70 Tahun Junus Jahja, Pribumi Kuat Kunci Pembauran*, PT.Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1997.
- Weber, Max. 1946. *Theory of Social and Economic Organization*, Penerjemah A.Henderson & Talcott Parsons, Oxford University Press, New-York.
- Wibowo,I, 2000. *Harga Yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wilmott, D.E, 1960. *The Chinese of Semarang, A. Changing Minority Community in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaka.
- Willis, Paul, 1990. *Common Culture Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures Of the Young*, Westview Press, San Francisco.
- Winzeler, Robert L, 1997. *Indegenous Peoples and The State*, Monograph 46/Yale Southeast Asia Studies, America.
- Wolfe, Alvin W and Yang Honggang, 1996. *Antropological Contribution to Conflict Resolution*, The University of Georgia Press, London.
- Wright at all, 1989. *The Debate On Classes*, Verso, New York.
- Yang, Twang Peck, 2005. *Elite Bisnis Cina Di Indonesia, dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Niagara, Yogyakarta.
- Yin, Robert K, 1989. *Case Study Research, Design and Methods*. Sage Publications, London.
- Young, Kimbal & Raymond W.Mack , 1959. *Sociology and Social Life*, American Book Company, New-York.
- Yuanzhi, Kong, 1999. *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Yudohusodo, Siswono, 1986. *Warga Baru, Kasus Cina di Indonesia*, Yayasan

- Padamu Negeri, Jakarta.
- Van den Berghe, Pierre, 1967. *Race and Racism; A Comparative Perspective*, John Wiley, New York.
- Vredenburg, J, 1983. *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Zartman, William I, 2001. *Preventive Negotiation*, Rowman and Littlefield Publishers, INC. Maryland.
- Skripsi/Tesis/Disertasi/Artikel/Koran/Majalah/Jurnal:**
- Bahrum, Shaifuddin, 2004. *WNI Keturunan Cina Dalam Percaturan Politik Indonesia, Kajian Terhadap Partisipasi WNIK dalam Pemilu 2004 di Makassar*, Tesis Pascasarjana Unhas, Makassar.
- El Faisal, Emil, 1999. *Proses Asimilasi WNI Keturunan Cina dengan Etnis Melayu Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana Unhas, Ujungpandang.
- Darwis: 2-8-2004. *Prilaku Diskriminatif Adalah Pelanggaran Hukum*, Kolom Analisis Tribun Timur.
- \_\_\_\_\_ 22-9-2004. *Mereka Cenderung Status Quo*, Kolom Analisis Tribun Timur.
- \_\_\_\_\_ 1993. *Keserasian Sosial di Perkotaan (Studi Pola Hubungan Sosial antara Etnik Cina dengan Etnik Bugis-Makassar di Kota Makassar)* Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ginjar Kartasmita. 3-1-1995. *Kerusuhan* (artikel), Kompas..
- Hamka, 2005. *Kajian Konflik Bernuansa Sara di Kota Makassar, Studi Kasus Pasca Pengganyangan Cina Black September 1997 di Kecamatan Wajo Kota Makassar*, Tesis Pascasarjana Unhas, Makassar.
- Harun, Moh, 15-4-1994. *Mengharmonisasikan Etnis Cina dan Pribumi* (Artikel) Harian Surya.
- Hikam, Muhammad AS, dkk. 1977. *Lokalitas, Etnisitas Dalam Hubungan Antarumat Beragama Di Empat Kota*, DEPAG-YIIS, Jakarta.
- Joice Gani, 1990. *Cina-Makassar; Suatu kajian tentang Masyarakat Cina di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujungpandang, 1990.
- Karnay, Hermansyah, 1999. *Adaptasi Sosial Etnis Tionghoa, Studi Adaptasi Sosial Generasi Muda Tionghoa Terhadap Sistem Nilai Etnis Bugis-Makassar di Kotamadya Tingkat II Ujungpandang*, Skripsi FISIP Unhas.
- Latif, Sukriansyah S dan Tomi Lebang, 1998 *Amuk Makassar*, ISAI, Jakarta.
- Lieberson, Stanley, 1961. *A Societal Theory of Race and Etnich*, dalam American Sociology Review Vol. 30 Desember.
- Lohanda, Mona, 1996. *The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942*, Penerbit Jambatan, Jakarta.
- Kaharuddin, 1088. *Adaptasi Dan Integrasi Orang Cina di Kotamadya Ujungpandang*, Skripsi, FISIP Unhas, Ujungpandang 1988.
- Kumpulan Selingan MBM Tempo, 1985. *Cina Semilyar Wajah*. Pustaka Azet, Jakarta.
- Mangenda, Burhan, 1990. *Perubahan dan Kesinambungan dalam Pembelaan Masyarakat Indonesia*, dalam Prisma No 4 tahun XIX, Jakarta.
- Mokoto Ito, 2004. *Peranakanization, Indonesianization, and Cultural Citizenship among Ethnic Chinese in an Indonesian Town: the Case of Makassar*.

- Nasrun, Mappa (dkk), 1977/1978. **Masalah WNI Keturunan Cina di Indonesia Dalam Kerangka Integrasi Nasional Suatu Studi Pendahuluan**, U n h a s - D e p d a g r i , Ujungpandang,
- 1977/1978. **Identifikasi Masalah dan Strategi Dasar Peningkatan partisipasi Aktif WNI Keturunan Cina dalam Pembangunan**. U N H A S - D E P D A G R I, Ujungpandang.
- Paulus, BP, 1976. **Masalah Cina, Hasil Penelitian Ilmiah di beberapa Negara Asia dan Australia**, P T. Karya Nusantara: Bandung.
- Suparlan. 1980. **Berita Antropologi, No. II Tahun 1980**.
- Suranto, Hanif, 2000. **Konflik Multikultur, Panduan Meliput Bagi Jurnalis**, LSPP, Jakarta.
- Sunarto, Kamanto, 1986. **Teori Hubungan Kelompok**, Bahan pengajaran, PAU-IS-UI, Jakarta.
- Majallah Tempo No.8 Tahun X tanggal 19 April 1980.
- Usman, Ahmad, 22-9-1997. **Tragedi Kelabu di Makassar** (artikel) Harian Fajar Makassar.
- Wignyosubroto, Sutandyo, 1986. **Keserasian Sosial Kota Pelabuhan, Studi Kasus Kota Surabaya**, makalah d i s a m p a i k a n pada Seminar HIPPIIS di Ujungpandang.